

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional disamping melahirkan banyak perkembangan di berbagai sektor, disisi lain kemerosotan perekonomian nasional tentang ekonomi kerakyatan beberapa waktu terakhir masih terus menjadi bahan diskusi di berbagai forum dan oleh banyak pihak. Faktor pasti yang menyebabkan hal tersebut terjadi yaitu ketergantungan ekonomi Indonesia pada sekelompok usaha kecil dan konglomerat yang ternyata tidak memiliki struktur internal yang kuat. Menurut Lia Amalia (2012) dalam penelitiannya yang berjudul “Peranan Koperasi Dalam Pembangunan Ekonomi (Sebuah Pengamatan Deskriptif di Indonesia)” mengatakan bahwa adanya ketergantungan tersebut merupakan konsekuensi logis dari kebijakan ekonomi nonliberal yang mengedepankan pertumbuhan dengan asumsi apabila pertumbuhan tinggi dengan sendirinya akan membuka banyak lapangan kerja, dan arena banyak lapangan kerja maka kemiskinan akan berkurang. Kebijakan ekonomi tersebut ternyata menghasilkan struktur ekonomi yang tidak seimbang. Didalam struktur ekonomi yang tidak seimbang tersebut, sekelompok kecil elit ekonomi – yang menurut BPS (Badan Pusat Statistik) jumlahnya kurang dari 1% dari pelaku ekonomi – mendapatkan berbagai fasilitas dan hak istimewa untuk menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi dan karenanya mendominasi sumbangan dalam PDB (Produk Domestik Bruto), pertumbuhan ekonomi, maupun pangsa pasar. Maka dari itu, diperlukan wadah untuk menampung dalam hal meningkatkan pasal kesejahteraan masyarakat pada khususnya masyarakat ekonomi lemah. Badan usaha yang sesuai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tersebut adalah koperasi, sebab koperasi satu-satunya yang mempunyai asas kekeluargaan dan gotong royong. Hal ini dilihat dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yaitu, “(1) Perekonomian disusun bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan”.

Menurut Arifinal Chianago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia, koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya.

Sedangkan menurut UU No. 25 Tahun 1992, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasar atas azas kekeluargaan. Maka dari itu kemudian perkembangan koperasi harus mempunyai sistem dan prosedur yang baik. Penyusunan sistem dan prosedur yang baik dalam suatu koperasi merupakan faktor yang sangat penting untuk menunjang koperasi dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik.

Sistem dan prosedur merupakan satu kesatuan yang erat kaitannya. Karena sistem adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun dengan suatu skema yang menyeluruh untuk melaksanakan atau fungsi utama dari permasalahan, Gerald Cole di kutip Zaki Baridwan (2007:3). Sistem yang baik harus mampu memberikan informasi yang tepat dan akurat yang dibutuhkan oleh pihak manajemen koperasi untuk mengetahui aktifitas dan kinerja koperasi secara langsung maupun tidak langsung. Keakuratan informasi yang disampaikan akan mampu memperkecil resiko pengambilan keputusan kurang baik dalam prosedur operasional yang dilakukan. Selain dari pihak internal koperasi, informasi juga diperlukan berbagai macam pihak yang berkepentingan diluar koperasi. Sedangkan prosedur yang baik akan mampu menjamin pengendalian baik pengawasan maupun ketertiban dalam pencatatan transaksi yang terjadi. Dengan sistem dan prosedur yang baik, maka sistem pengendaliannya pun baik. Dimana sistem pengendalian intern terdapat unsur sistem informasi akuntansi yang dijalankan oleh koperasi dan mempunyai peranan penting terhadap usaha untuk menjaga harta kekayaan. Semakin baik sistem pengendalian intern suatu koperasi, maka semakin tinggi tingkat keamanan harta kekayaan dan sebaliknya, semakin buruk sistem pengendalian intern di suatu koperasi maka semakin rendah tingkat keamanan harta kekayaannya.

Oleh sebab itu, pengendalian intern harus dilakukan oleh setiap perusahaan maupun koperasi. Pada KP-RI Universitas Jember ini dalam menjalankan usahanya terdapat prosedur penerimaan dan pengeluaran barang dagangan. Prinsipnya, pengendalian intern memiliki struktur pembagian tanggungjawab fungsional secara tegas, diantaranya : (1) Kegiatan penerimaan barang, yang diserahkan kepada suatu unit khusus yaitu bagian penerimaan; (2) Kegiatan pencatatan, yang diserahkan kepada bagian akuntansi; (3) Kegiatan penyimpanan barang, yang diserahkan kepada bagian gudang. Bagian ini harus dipisahkan dari bagian penerimaan, karena fungsi menerima barang berbeda dengan fungsi penyimpanannya. Fungsi penerimaan

memerlukan keterampilan pengecekan dan pengujian kualitas, sedangkan fungsi penyimpanan memerlukan kehati-hatian dan keterampilan dalam mengamankan dan menyelamatkan barang.

Namun pada KP-RI Universitas Jember, ketiga fungsi tersebut belum dijalankan dengan sempurna sehingga sering terjadi ketidakcocokan antara pencatatan stock penerimaan barang di gudang dan pada saat pengeluaran atau pendistribusian barang dari gudang ke toko, risiko kehilangan ataupun kerusakan pada barang juga masih sering terjadi, fenomena ini penulis peroleh berdasarkan sumber dari internal KP-RI Universitas Jember. Maka dipandang perlu oleh penulis untuk dilakukan evaluasi terkait hal tersebut, agar nantinya dapat menjadi acuan demi tercapainya tujuan koperasi, salah satunya yaitu meningkatkan profitabilitas koperasi secara signifikan. Pembahasan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh penulis dalam penelitian ini.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran barang dagangan pada KP-RI Universitas Jember pada penerapannya sudah sesuai dengan standar pengendalian intern dalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) 2011?
- b. Apakah penerapan pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran barang dagangan pada KP-RI Universitas Jember sudah efektif?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat ditentukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran barang dagangan pada KP-RI Universitas Jember sesuai standar pengendalian intern dalam SPAP (Standar Profesi Akuntan Publik) 2011.
- b. Untuk mengukur tingkat efektivitas pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran barang dagangan pada KP-RI Universitas Jember.

1.4. Manfaat Penelitian

- a. Bagi lembaga Koperasi

Memperoleh dorongan atau motivasi di dalam mengembangkan usahanya dengan jalan meningkatkan jumlah penjualan dan modal serta dipakai sebagai pertumbuhan pengurus dalam usaha meningkatkan kinerja untuk keberlangsungan usaha koperasi tersebut.

b. Bagi penulis

Untuk menambah pengetahuan dan pengalaman yang bermanfaat, khususnya mengenai penerapan sistem pengendalian intern atas penerimaan dan pengeluaran barang daganganterhadap penjualan pada koperasi.

c. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan khususnya bagi pihak-pihak yang membutuhkan.